

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2016  
BIRO KEUANGAN

Indikator	Kondisi Target Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Penjelasan
	2016	
1	2	3
Jumlah pengelola keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat yang tertata dengan baik	27 Kab/Kota 1 Provinsi 49 OPD 12 Biro	Keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan
Prosentase implementasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah (SIPKD)	100%	Aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel
Tingkat kecocokan rekonsiliasi keuangan (Pendapatan Pajak Daerah)	100%	untuk menguji kesesuaian dan kecocokan data keuangan yang dimiliki
Prosentase SP2D yang diterbitkan tepat waktu	100%	Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lama dalam 2 hari kerja. Jikadokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, BUD/kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D yang dinyatakan paling lama dalam 1 (satu) hari kerja  Selengkapnya :
Keputusan Gubernur hasil evaluasi P2 APBD	3 Dokumen	Evaluasi Kebijakan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil analisis dan kesimpulan mengenai Keputusan Gubernur
PERDA APBD/APBDP Provinsi Jawa Barat	2 Dokumen	Suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PERDA PERGUB P2 APBDP Provinsi Jawa Barat	2 Dokumen	Suatu rangkalan prosedur pengawasan yang dilakukan oleh Instansi - instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, selanjutnya sebagai bentuk legalitas dari mekanisme PPAPBD dibentuk Perda
Tingkat pemenuhan opini WTP dari auditor Independen atas laporan keuangan Provinsi Jawa Barat : -Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat	100% 1 Dokumen	pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
Jumlah laporan pemutakhiran keuangan daerah		
- DAU	2 Dokumen	Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
-Belanja pegawai dan fixed cost	2 Dokumen	Belanja pegawai semua pengeluaran yang langsung berhubungan dengan pegawai dan menjadi penghasilan bagi pegawai baik berupa uang maupun dalam bentuk barang pangan
- Rekonsiliasi dan sinkronisasi keuangan daerah	2 Dokumen	rekonsiliasi dan sinkronisasi ini bertujuan agar neraca awal tersusun sesuai ketentuan dan kondisi riilnya sehingga memberi kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan akhir tahun